

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan Internasional yang lahir pada abad ke-20 menjadi jendela dalam menjalin kontak antar negara. Negara menggunakan berbagai cara untuk dapat berkomunikasi dengan negara lain agar kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut tercapai. Dalam proses mewujudkan kepentingan nasional suatu negara, hubungan internasional menawarkan proses komunikasi yang disebut diplomasi. Diplomasi merupakan salah satu cara untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi sendiri adalah seni mengedepankan kepentingan nasional melalui cara negosiasi dan cara-cara damai lainnya, apabila cara tersebut tidak berhasil maka penggunaan kekuatan nyata dimungkinkan. Diplomasi sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu, *hard power* dan *soft power*. Pada periode perang dunia banyak negara yang menjalankan *hard power diplomacy* dalam mencapai tujuannya. *Hard power* didasarkan pada intervensi militer, diplomasi koersif dan sanksi ekonomi dan bergantung pada sumber daya nyata seperti angkatan bersenjata atau sarana ekonomi. Tetapi dewasa ini *hard power diplomacy* sangat sukar untuk diterapkan kembali kepada kebijakan suatu negara, karena hampir seluruh negara melarang keras tindakan itu.

Pada tahun 1990, Joseph S. Nye mengidentifikasi perbedaan antara kedua jenis diplomasi melalui bukunya yang berjudul *Bound to Lead*. Dia membandingkan teorinya tentang *soft cooptive power* dengan kekuatan yang dapat diukur (*or hard command power*) dengan menemukan fakta bahwa *hard power* memberikan hasil dengan cara memberi paksaan seperti militer “*stick*” atau ekonomi “*carrots*”. Dengan demikian, invasi Jerman ke Polandia pada tahun 1939 dan sanksi ekonomi PBB terhadap Irak pada tahun 1991 setelah Perang Teluk pertama adalah contoh penggunaan kekuatan keras. Sebaliknya, teori yang berkaitan dengan *soft power* adalah terkait dengan sebuah “*attraction*”(Nye,

1990). Sederhananya hard power dapat memaksa negara melakukan sesuatu yang mereka tidak ingin melakukannya. Sedangkan soft power sebaliknya, soft power akan menyebabkan suatu negara, tanpa ancaman atau transaksi, ingin melakukan hal yang sama.

Dengan kata lain *co-optive* atau *soft power* adalah kapasitas untuk membujuk orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan. Menurut Nye, kekuatan persuasif didasarkan pada daya tarik dan persaingan dan “terkait dengan sumber daya tidak berwujud seperti budaya, ideologi, dan institusi”(Nye, 1990). Cooper menekankan pentingnya legitimasi untuk konsep *soft power*. Kegiatan negara perlu dianggap sah untuk meningkatkan *soft power*. Penyebaran budaya Amerika di blok Timur selama Perang Dingin menunjukkan keberadaan *soft power* Amerika dan proses perluasan UE yang lebih baru adalah indeks untuk *soft power* yang dimiliki oleh UE. Konsep *hard power* dan *soft power* adalah sebuah kontinum dengan beberapa instrumen dari berbagai tingkat paksaan atau persuasi. Instrumen-instrumen tersebut adalah hukuman, paksaan, bujukan, penetapan agenda, bujukan dan daya tarik.

Dengan ini negara-negara yang ada di dunia mulai beralih ke *soft power diplomacy*, dimana dengan menunjukkan suatu identitas negara (atraksi) guna mencapai kepentingan nasionalnya. Ini ditujukan agar negara yang menjadi sasaran *soft power diplomacy* memberikan sebuah citra positif terhadap negara yang menjalankan *soft power diplomacy*. Citra positif ini lah menjadi indikasi yang dapat dimanfaatkan oleh suatu negara demi mencapai kepentingan nasionalnya di negara lain. Sejak awal 1990-an, ratusan esai dan artikel ilmiah telah diterbitkan di Republik Rakyat China tentang soft power. Istilah tersebut juga telah memasuki bahasa resmi China. Dalam pidato utamanya di Kongres Nasional Partai Komunis China (CPC) ke-17 pada tanggal 15 Oktober 2007, Presiden Hu Jintao menyatakan bahwa BPK harus “meningkatkan budaya sebagai bagian dari kekuatan lunak negara kita . . . faktor yang semakin penting dalam persaingan kekuatan nasional secara keseluruhan.”(Nye, 2012)

Pengembangan kekuatan lunaknya juga merupakan strategi cerdas bagi China. Ketika kekuatan keras suatu negara meningkat secepat China, itu dapat menakuti tetangganya, tetapi jika itu juga meningkatkan kekuatan lunaknya, kecil kemungkinannya untuk menakut-nakuti mereka untuk berkoalisi melawannya. China selalu memiliki budaya tradisional yang menarik. Nilai-nilai Konfusianisme tentang keharmonisan sosial, ritual, kesalehan anak dan aturan welas asih menyebar untuk mempengaruhi sebagian besar Asia Timur. Seperti yang baru-baru ini ditulis oleh Henry Kissinger, 'dalam eksepsionalisme versi China, China tidak mengeksport nilai-nilainya tetapi membiarkan orang lain datang untuk mencarinya(Kissinger et al., 2011). '

Dengan ini China membuat kebijakan luar negri nya lebih condong ke arah *soft power*. Ini karena China melihat *soft power* sebagai kekuatan baru dan sebagai sarana untuk menghindari konflik tapi tetap dapat mencapai kepentingan nasional(Shambaugh, 2005). Sejalan dengan ini, Partai Komunis China (PKC) melunakkan kebijakan "*peaceful rise*" menjadi "*peacefull development*" dan membuat soft power menjadi prioritas dalam menjalankan kebijakan. Untuk mencapai tujuan ini, China telah menekankan akan meningkatkan pengaruh internasional budaya China melalui diplomasi publik(Boyd, 2013).

Diplomasi publik dapat dimaknai sebagai proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik mancanegara yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya(J. Wang, 2006). Sederhananya negara melakukan diplomasi publik untuk meningkatkan image di dunia internasional. Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya bahwa diplomasi publik ditunjukkan untuk mendapatkan *image* positif dari masyarakat internasional. Menurut Nicholas J. Cull dalam tulisannya, mengkategorisasikan aktifitas diplomasi publik ke dalam enam bentuk(Cull, 2009). Dan salah satunya terdapat *cultural diplomacy*. *Cultural diplomacy* merupakan suatu rangkaian tindakan, yang didasarkan pada dan memanfaatkan pertukaran ide, nilai, tradisi dan aspek budaya atau identitas lainnya, baik untuk memperkuat hubungan,

meningkatkan kerjasama sosial budaya, mempromosikan kepentingan nasional dan seterusnya. Menurut Cull salah satu bentuk praktek dalam *cultural diplomacy* adalah dengan didirikannya pusat kebudayaan suatu negara di negara lain yang akan mempermudah masyarakat untuk mengenali kebudayaannya(Cull, 2009).

Ailuropoda melanoleuca atau panda raksasa merupakan hewan khas asal negeri tirai bambu. Citra panda digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan dukungan publik dan politik dalam kebijakan luar negeri China. Karena panda sudah menjadi bagian dari identitas nasional China. Panda yang dijadikan maskot nasional China telah mendapatkan jackpot karena panda yang suka diemong adalah salah satu hewan paling populer. Penampilan panda yang lucu dan menggemaskan cocok untuk segala hal mulai dari logo aplikasi hingga poster pariwisata, dengan beruang hitam dan putih menghiasi jutaan *t-shirt*, *mug*, dan barang konsumsi lainnya. Panda juga merupakan tambang emas media bagi pemerintah China, karena hewan-hewan tersebut memberikan penambah citra kekuatan lembut yang sempurna, yang menggambarkan Beijing dalam cahaya yang lebih ramah dan damai(Luedi, 2020).

China sangat menyadari kemampuan fotogenik panda, jadi tidak heran jika beruang hitam putih ini ditampilkan secara mencolok dalam kampanye luar negeri Beijing. Para duta besar China juga membawa misi dengan membawa panda melintasi dunia bertemu dengan para pemimpin dunia dan menghibur penduduk setempat di berbagai lokasi termasuk Kanada. Ini dibuktikan pada tahun 1985 dimana China meminjamkan dua panda (Qinn Qinn dan Sha Yan) ke Kanada selama tiga bulan di kebun binatang Toronto. Tiga tahun kemudian, dua panda lagi, Wei Lun dan Xi Xi, dipinjamkan ke Kanada oleh China sebagai bagian dari perayaan Olimpiade Musim Dingin Calgary 1988. Kanada harus menunggu lebih dari dua dekade untuk mendatangkan pasangan panda lainnya, dengan perjanjian pinjaman ketiga yang baru selesai pada 2013(Luedi, 2020). Masuknya Er Shun dan Da Mao pada 2013 mengikuti pelunakan sikap anti-China yang sebelumnya keras dalam pemerintah Harper. Program panda China lebih dari sekadar taktik

pemasaran; ini juga lebih dari sekadar konservasi; pada kenyataannya, panda adalah hewan politik(Luedi, 2020).

Hal inilah yang menimbulkan sebuah kebijakan luar negeri China yang baru dan terkenal pada masa perang dingin (1946-1991), yaitu Diplomasi Panda. Saat China memberikan hadiah berupa panda ke negara lain itu merupakan langkah awal dalam memulai persahabatan(Randall, 2011). Beberapa negara yang sudah menjalin kerjasama dengan menerapkan panda sebagai *ambassador* antara lain Amerika, Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Jerman, Australia, Malaysia, Singapura, India, Inggris, Thailand, dan Prancis(Xichao, 2013).

Kanada merupakan negara yang berada di benua Amerika tepatnya dibagian utara yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Pada tahun 1970 di 13 Oktober, China resmi membangun hubungan diplomatic dengan Kanada. Kanada diwakili oleh kedutaan besar di Beijing dan konsulat jenderal di Chongqing, Guangzhou, Hong Kong dan Shanghai. Misi diplomatik ini didukung oleh jaringan sekunder 10 kantor perdagangan, tersebar di seluruh negeri, yang dioperasikan melalui pengaturan dengan Canadian Commercial Corporation. Ikatan antara Kanada dan China tidak hanya dirasakan oleh pemerintah tetapi juga masyarakat kedua negara. Lebih dari 1,3 juta orang Kanada berasal dari China, dan bahasa Mandarin adalah bahasa yang paling banyak digunakan di Kanada setelah bahasa Inggris dan Prancis. Imigran Kanada yang lahir di China juga menciptakan komunitas terpisah di Beijing dan Hong Kong. Hal ini sangat menggambarkan keharmonisan hubungan bilateral yang terjalin antara kedua negara yang sangat baik.

Perdana Menteri Kanada Pierre Elliott Trudeau, ayah Perdana Menteri saat ini, adalah salah satu pemimpin Barat pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1970, sembilan tahun sebelum Amerika Serikat melakukannya. Sejak saat itu, sikap Kanada terhadap China hampir sejajar dengan sikap Amerika Serikat. Ottawa, seperti Washington, mengadopsi kebijakan keterlibatan berdasarkan aspirasi potensi komersial hubungan, serta keyakinan bahwa China akan semakin meliberalisasi urusan

dalam negerinya dan menjadi anggota yang bertanggung jawab dari masyarakat internasional(Hyland, 2020).

Bahkan setelah pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap para demonstran sebagai reaksi terhadap demonstrasi Lapangan Tiananmen pada tahun 1989, ini membuat citra China memburuk dihadapan Kanada yang mengedepankan Hak Asasi Manusia. Menyusul insiden itu, Kanada menghukum kepemimpinan China dan menanggukkan kolaborasi di berbagai sektor, tetapi seperti yang dikatakan Joe Clark, menteri luar negeri saat itu untuk urusan luar negeri, "kami belum, dan tidak akan menjadi, anti-China [...] Kita harus berusaha untuk mencegah tindakan yang akan memaksa China semakin jauh ke dalam isolasi.' Kanada segera memulai kembali kolaborasi dengan China, menyelaraskan dirinya sekali lagi dengan posisi AS(Hyland, 2020). Ketika Perdana Menteri Stephen Harper menjabat pada tahun 2006, dia tiba-tiba meninggalkan strategi ini, menyalahkan pemerintah Liberal dan Konservatif masa lalu karena gagal melindungi hak asasi manusia dan demokrasi di China. Harper menyatakan bahwa dia tidak akan menjual nilai-nilai penting Kanada "untuk dolar yang mahakuasa", mengunjungi Dalai Lama di kantornya di Ottawa (dengan bendera Tibet dipasang di atas mejanya), dan menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan menghadiri Olimpiade Musim Panas 2008 di Beijing. Namun, pada tahun 2009, Harper melakukan perjalanan ke China dan mengadvokasi kolaborasi dan perdagangan bilateral. Pada tahun 2012, Harper memuji "kerjasama strategis kedua negara " dan mengumumkan kesimpulan sukses dari pakta promosi dan perlindungan investasi asing bilateral dengan mitranya dari China, Wen Jiabao. Selain itu, kedua pemimpin b memulai studi kolaboratif untuk menyelidiki "kelayakan dan beberapa potensi kesepakatan perdagangan bebas" (FTA)(Hyland, 2020).

Dari pembentukan hubungan diplomatik resmi pada tahun 1970 hingga pemilihan pemerintahan Liberal di bawah Justin Trudeau pada akhir tahun 2015, hubungan Tiongkok-Kanada secara luas dapat dibagi menjadi dua fase: 1970-2006 dan 2006-2017. Terlepas dari gesekan atas masalah hak asasi manusia selama reformasi sistematis China yang signifikan, kedua belah pihak terus

memperdalam kerja sama ekonomi mereka selama fase pertama. Saat situasi internal China menjadi stabil, isu hak asasi manusia memainkan peran penting dalam memecah hubungan China-Kanada setelah tahun 2006, dengan kedatangan pemerintah Harper di Ottawa. Terlepas dari kenyataan bahwa kerja sama perdagangan dan perdagangan masih dapat berkembang, strategi dan persepsi yang berbeda tentang masalah hak asasi manusia telah menjadi masalah tersembunyi dalam hubungan Kanada-Tiongkok.

Tujuan China dalam menjaga hubungan dengan Kanada adalah untuk memperkuat dan melestarikan kerja sama bilateral yang sudah ada. Pembentukan hubungan bilateral antara China dan Kanada, menurut Menteri Luar Negeri China Wang Yi, mungkin akan mengantarkan "periode global baru". Menurut Li Haidong, seorang profesor di Institut Hubungan Internasional Universitas Hubungan Luar Negeri China, hubungan bilateral antara kedua negara memiliki banyak potensi untuk sukses di bidang-bidang di mana kerja sama telah terjalin, seperti perdagangan, energi, dan segera. Pertemuan 2016 antara kedua negara menjadi topik penting bagi kedua belah pihak untuk hadir. Pertemuan tersebut dapat menjadi forum bagi mereka untuk berkomunikasi secara aktif, membangun kepercayaan, dan menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang signifikan bagi kedua belah pihak (Qingyun, 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini yaitu Apa yang ingin dicapai pemerintah China dalam diplomasi panda terhadap Kanada ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplanasi kepentingan China terhadap Kanada melalui kebijakan luar negrinya yaitu diplomasi panda pada tahun 2013-2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam suatu penelitian untuk dapat menyelidiki isu – isu yang bersifat relevan dengan mengkonfirmasi mengenai posisi teori – teori dan juga empiris. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai suatu fenomena dengan sedikit penekanan.

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan penjelasan bahwa panda sebagai hewan khas dari China bisa memberikan pengaruh besar dalam dunia hubungan internasional, terkhususnya dalam pelaksanaan praktek diplomasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi publik, baik itu kalangan dari studi ilmu hubungan internasional maupun bagi semua kalangan secara umum, serta dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam memanfaatkan panda sebagai instrumen diplomasi.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang panda sebagai sarana diplomasi bukanlah hal baru saat ini. Banyak cendekiawan dari hubungan internasional maupun umum yang melakukan penelitian terhadap topik tersebut. Tinjauan pustaka ditujukan untuk dapat memberi informasi mengenai penelitian – penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian – penelitian sekarang termasuk penelitian ini. Dapat dikatakan, sudah banyak bahan bacaan ataupun karya ilmiah yang membahas tentang keterkaitan olahraga khususnya panda dengan hubungan internasional.

Jurnal pertama karya Safira Mutia Mayangsari, Reni Windiani, Satwika Paramasatya (2021) yang berjudul “Peran Diplomasi Panda China dalam Kerjasama Konservasi Panda Raksasa di Indonesia” membahas mengenai panda yang menjadi instrument diplomasi. Diplomasi Panda merupakan salah satu alat

diplomasi publik China untuk menjalin hubungan dengan negara-negara mitranya. Panda juga digunakan sebagai simbol konservasi internasional dan sebagai maskot olahraga banyak. China menggunakan sepasang beruang panda untuk menumbuhkan niat baik dan kerjasama dengan negara sahabat, termasuk Indonesia. China dan Indonesia saat ini sedang memperkuat kerjasama di bidang konservasi satwa liar, khususnya panda raksasa. Diplomasi panda China berkontribusi pada terjalinnya hubungan kerja sama dengan negara Indonesia, khususnya di bidang perlindungan hewan. China dan Indonesia meningkatkan kerjasama di berbagai industri seperti ekonomi dan perdagangan, investasi, infrastruktur, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui diplomasi panda. Selain itu, diplomasi panda dapat membantu meningkatkan citra Indonesia di mata internasional dalam hal konservasi dan masyarakat panda raksasa. Indonesia mendapatkan pengetahuan tentang cara menyelamatkan panda dari kepunahan dan meningkatkan kesadaran tentang cara menyelamatkan makhluk langka dari kepunahan.

Jurnal kedua terdapat hasil penelitian dari Aulia Surya Putri Darmawan, Christy Damayanti, dan Halifa Haqqi (2020) yang berjudul “Diplomasi panda sebagai diplomasi publik China terhadap Jepang”. Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis diplomasi panda sebagai diplomasi publik China dengan Jepang. Penelitian ini mengkaji teori diplomasi publik dan teori hubungan bilateral. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang panda diplomacy sebagai diplomasi publik China dengan Jepang. Metode deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Berdasarkan data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa diplomasi panda sebagai diplomasi publik China berpotensi menarik masyarakat dan media Jepang. Dengan mendirikan The Panda Protection Institute of Japan, sebuah organisasi sukarela swasta non-pemerintah di Jepang, diplomasi panda China mampu mempengaruhi dan meningkatkan kesadaran pelestarian satwa liar di masyarakat Jepang. PPIJ memiliki potensi untuk meningkatkan hubungan bilateral antara China dan Jepang.

Hasil dari pemaparan jurnal dan penelitian diatas, penulis menyatakan bahwa panda dapat dijadikan sebuah instrument dalam berdiplomasi antara negara baik dalam memperluas kepentingan nasional mereka. Hewan khas China ini memang menjadi instrument yang menarik dalam berdiplomasi. Hasilnya terdapat relevansi antara beberapa sumber – sumber diatas yaitu dengan menggunakan panda sebagai alat berdiplomasi untuk dapat menemukan kesepakatan. Perbedaan antara studi terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis ingin mencari tahu serta memaparkan mengenai bagaimana efektivitas cara panda yang merupakan seekor hewan dapat menjadi jalan untuk China guna mencapai kepentingan nasional nya ke Kanada. Melihat bagaimana efek dari penggunaan diplomasi panda dan bagaimana besarnya pengaruh yang terjadi kepada hubungan antara China dan Kanada

F. Kerangka Teori

1. Konsep Diplomasi Publik

Diplomasi publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan -kebijakan yang diambil oleh negaranya(J. Wang, 2006). Menurut Jay Wang (2006), diplomasi publik adalah upaya untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara negara dan masyarakat. Konsekuensinya meliputi konsekuensi politik, ekonomi, dan sosial, dan pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Sementara itu, Jan Mellisen (2006) mendefinisikan diplomasi publik sebagai upaya mempengaruhi orang atau kelompok lain di luar negaranya sendiri untuk mengubah persepsi orang tersebut terhadap suatu negara. Jika ditarik benang merah dari kedua definisi diatas diplomasi publik berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi publik diluar negri(Melissen, 2005).

Program diplomasi publik dianggap sebagai bagian dan instrumen kebijakan luar negeri, terkait dengan prioritas pemerintah dalam politik internasional. Tetapi dalam menjalani diplomasi publik membutuhkan penekanan yang lebih kuat pada pembangunan sebuah hubungan, dan menurut Wang ini dapat terjadi jika tiga tindakan ini dilakukan :

1. Mempromosikan tujuan dan kebijakan negara-bangsa.
2. Mengkomunikasikan nilai dan cita-cita mereka.
3. Mengembangkan pemahaman bersama dan rasa saling percaya di antara negara dan masyarakat.

Diplomasi publik juga memiliki tiga tingkatan komunikasi (Anholt, 2006) yaitu: (1) perangkat diplomasi publik `menjual` apapun bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) `menjual` kebijakan pemerintah, namun dengan kewenangan untuk mengondisikan model dan isi kebijakan luar negerinya, (3) menempatkan sebagai instrumen kebijakan, bukan pada metode komunikasi kebijakan. Dalam tahapan ini banyak digunakan pendekatan - pendekatan yang sifatnya *soft power* dibanding *hard power* dalam mengubah pemahaman dan perilaku kelompok sasaran.

Diplomasi public mempunyai beberapa instrument untuk menjalankannya seperti, budaya suatu negara, kebijakan luar negri, festival, ataupun hewan khas dari suatu negara. Hewan sekarang digunakan oleh diplomat publik untuk tujuan yang sama: untuk menarik khalayak sasaran dalam jumlah besar dengan menggunakan gambar hewan yang lucu atau menggemaskan dan untuk memproyeksikan, secara langsung atau tidak langsung, citra negara yang damai, lembut, atau menarik (Hyland, 2020). Dan China memiliki Panda yang menjadi instrument dalam diplomasi publik.

Xing menegaskan bahwa diplomasi panda adalah "sumber daya yang telah lama diabaikan" dan berpendapat bahwa "daya tarik universal panda berfungsi sebagai aset soft power alternatif penting yang memungkinkan China mendekati audiens yang lebih luas di negara asing" (Xing, 2010a).

Dalam kebijakan diplomasi panda China, pemerintah China menggunakan panda sebagai salah satu ciri khas negaranya untuk mengubah citra masyarakat

Kanada kepada negara China menjadi lebih positif. Serta dalam upaya mempererat hubungan diplomatic dengan pemerintah Kanada.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan tujuan yang harus dimiliki setiap negara dalam berhubungan internasional. Ini menjadi sebuah titik vital dimana dengan cara apapun sebuah kepentingan nasional harus diutamakan guna mensejahterakan rakyat yang ada di negara tersebut.

Konsep *National Interest* menurut Donald E. Nuchterlain merupakan sebuah konsep dimana aktor melakukan upaya dalam menyampaikan kepentingannya yang juga merupakan kebutuhan atas negaranya dalam melakukan hubungan eksternal dengan negara-negara di dunia internasional. Konsep Kepentingan Nasional menurut Edward dapat dibagi menjadi 4 bagian diantaranya adalah (Perwita & Yani, 2005);

- a) *Defense Interest*, yang merupakan adanya kepentingan dalam suatu negara, memiliki fungsi dalam hal melindungi Negara maupun rakyatnya dari adanya ancaman fisik berupa kekerasan yang memiliki kemungkinan dilakukan oleh negara lain. Selain itu melindungi suatu negara beserta rakyatnya dari adanya ancaman terhadap sistem yang berlaku di suatu negara.
- b) *Economic Interest*, adanya kepentingan nasional yang memungkinkan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas perekonomian sebagai hasil dari kerjasama yang dilakukan antar negara.
- c) *World Order Interest*, merupakan kepentingan tatanan dunia dengan menjamin bahwa system politik dapat terpelihara dan adanya jaminan terhadap perekonomian internasional agar suatu wilayah negara merasakan adanya keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat berjalan dengan lancar dan terjamin keamanannya diluar pengawasan negara.

d) *Ideological Interest*, merupakan kepentingan yang didasarkan pada ideologi yang dianut oleh setiap negara. Setiap negara dalam mengambil keputusan maupun merumuskan kebijakan selalu didasarkan pada *National Interest*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kepentingan nasional antara lain kemampuan negara, yang kemudian termasuk dalam bagaimana negara tersebut dapat memiliki perhatian negara lain. *Power*, inilah substansi penting dalam menjalankan strategi-strategi untuk mencapai kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dapat dilihat dari hubungan domestik maupun dalam hubungannya dengan kemampuan negara lain, dikumpulkan untuk menghasilkan apa yang disebut dengan *power* (kekuasaan).

Kepentingan nasional juga dapat digunakan untuk mempertahankan posisi dalam hubungan internasional. Setiap negara tertarik untuk mendapatkan kekuasaan atau pengaruh. Kepentingan nasional, menurut H.J.Morgenthau, sama dengan pengejaran kekuasaan oleh negara, dimana kekuasaan diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menciptakan dan mempertahankan dominasi suatu negara atas negara lain (Morgenthau, 1985). Akibatnya, negara mau tidak mau memiliki kepentingan nasional yang harus diwujudkan, dan tidak jarang dalam usaha untuk mewujudkannya suatu negara memerlukan bantuan negara lain. Oleh karena itu, kerjasama antara negara-negara tersebut didirikan sebagai landasan dengan tujuan menghasilkan kepentingan nasional.

China sebagai sebuah negara pasti memiliki kebutuhan vital yang harus dipenuhi, diantaranya adalah ekonomi. Untuk mencapai kepentingan nasional ini China menggunakan diplomasi panda ke Kanada sebagai negara yang dapat memenuhi kepentingan nasionalnya.

G. Hipotesa

Berdasarkan pada sintesa pemikiran, rumusan masalah, dan latar belakang masalah, maka hipotesa pada penelitian ini, China membuat kebijakan diplomasi panda terhadap Kanada untuk mengubah citra China dalam persepsi masyarakat Kanada agar lebih positif dan untuk mempererat hubungan diplomatik antar kedua negara.

H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang bermaksud untuk dapat memahami fenomena – fenomena teag subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lainnya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu tentang suatu fenomena. Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan mengumpulkan data atau informasi yang berdasarkan fakta kepada objek selanjutnya yang akan diteliti serta dianalisis, sehingga dapat mendukung hasil akhir dari penelitian ini. Sangat penting untuk penelitian internet yang dapat mengakses artikel, jurnal, maupun karya ilmiah yang dapat dioptimalkan sebagai sumber data dari penelitian ini.

I. Jangkauan Penelitian

Untuk dapat membahas dan menganalisis secara lebih terperinci terkait efektifitas diplomasi panda yang dilakukan oleh China ke Kanada, penulis harus mampu berfokus agar tidak melebar keluar dari tema dan judul yang sudah dibuat dengan hanya berkisar pada permasalahan – permasalahan negara diplomasi panda China ke Kanada. Karena luasnya permasalahan, penulis membatasi rentang waktu penelitian yaitu sejak tahun 2010 – 2017. Namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menggunakan data diluar rentang waktu tersebut untuk melengkapi penelitian selama data tersebut relevan dengan tema penelitian yang ditulis.

J. Sistematika Penulisan

BAB I, Memaparkan mengenai subjek – subjek dari penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian serta jangkauan penelitian.

BAB II, Menjelaskan mengenai gambaran umum Diplomasi Panda yang dilakukan oleh China. Dalam bab ini juga dibahas mengenai bagaimana China melakukan diplomasi Panda terhadap negara lain.

BAB III, Memaparkan mengenai hubungan China dengan Kanada. Melihat bagaimana perkembangan Kerjasama kedua negara tersebut baik dari sisi politik maupun ekonomi

BAB IV, Pada bab ini akan dijelaskan mengenai alasan penggunaan panda sebagai salah satu sumber soft power negara China. Diplomasi panda menjadi ikon tanda persahabatan antara China dengan Kanada. Juga memaparkan bagaimana pengaruh diplomasi panda dalam mewujudkan kepentingan nasional China.

BAB V, bab ini berisi tentang penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dari analisis yang telah diteliti oleh penulis.